

IMPLEMENTASI PROSES VERIFIKASI DAN DOKUMENTASI DATA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA BRI UNIT AMPENAN

Mita Helpiniah¹

mitahelvinia314@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nurabiah²

nurabiah@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Proses Verifikasi dan Dokumentasi Data Penerima Program Keluarga Harapan pada BRI Unit Ampenan. Tujuan ini dicapai melalui kegiatan magang selama 4 (empat) bulan dengan melaksanakan berbagai aktivitas pada bagian operasional dan layanan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data nasabah dan layanan penyaluran bantuan sosial. Selama menjalani magang di BRI Unit Ampenan, penulis terlibat aktif dalam kegiatan verifikasi data penerima PKH, yang meliputi pengecekan kelengkapan berkas fisik (KTP, KK, dan KKS), pencocokan data dengan sistem internal BRI seperti BRISIM, serta proses klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara data nasabah dan data pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Melalui kegiatan tersebut, diperoleh pemahaman mengenai bagaimana alur proses verifikasi dan dokumentasi data dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan data awal, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, pembaruan informasi pada sistem perbankan, hingga penyimpanan dan pengarsipan berkas agar dapat diakses kembali secara efisien. Berdasarkan pembahasan dalam laporan tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai ketentuan dan tahapan yang harus dilalui dalam proses verifikasi dan dokumentasi data PKH, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen, validasi data melalui sistem, pembaruan informasi, dan pengarsipan. Semua tahapan ini merupakan bagian penting dalam memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan PKH oleh BRI Unit Ampenan.

Kata Kunci: Implementasi, Proses, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The purpose of this observation was to examine the implementation of the verification and documentation process of beneficiary data for the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) at BRI Ampenan Unit. This objective was achieved through a four-month internship program involving various activities in the operational and service divisions, particularly those related to customer data management and social assistance distribution services. During the internship at BRI Ampenan Unit, the author actively participated in the verification process of PKH beneficiary data, which included checking the completeness of physical documents (Identity Card/KTP, Family Card/KK, and Family Welfare Card/KKS), matching customer data with BRI's internal systems such as BRISIM, and conducting clarification procedures when discrepancies were found between customer data and the Integrated Social Welfare Data (DTKS). Through these activities, the author gained an understanding of how the verification and

documentation process is carried out systematically, starting from the receipt of initial data, examination of document completeness and authenticity, updating information in the banking system, and storing and archiving documents to ensure efficient future access. Based on the discussion presented in this final report, it can be concluded that there are various requirements and stages involved in the verification and documentation process of PKH data, including document completeness checks, data validation through the system, information updates, and document archiving. All of these stages play an important role in ensuring the accuracy and proper targeting of PKH assistance distribution by BRI Ampenan Unit.

Keywords: Implementation, Process, Family Hope Program (PKH)

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai inovasi baru untuk perguruan tinggi dalam memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studi (Susetyo, 2020). Kebijakan kampus Merdeka ini dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi fenomena sosial, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat sehingga mahasiswa mendapatkan kebebasan dalam belajar diluar perguruan tinggi. Tujuan dari Merdeka belajar ialah agar mahasiswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian dan minat yang didasari oleh inovasi pembelajaran untuk mendapatkan kualitas belajar yang sangat baik (Asiah, 2021).

Landasan hukum yang dapat menjadi acuan konsep kurikulum MBKM ialah buku panduan kegiatan pembelajaran sesuai dengan permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi atau di luar program studi. Proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka belajar yang ada di perguruan tinggi ialah memfokuskan pembelajaran pada mahasiswa (student centered learning) memberikan kebebasan dalam pengembangan diri, kreatifitas, kepribadian, interaksi sosial, manajemen, pengalaman dan kinerja yang menjadi pencapaian (Kemendikbudristek, 2020).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank milik negara memiliki peran penting dalam menyalurkan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial PKH. BRI Unit Ampenan berfungsi sebagai salah satu ujung tombak dalam proses penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat di wilayahnya. Dalam proses tersebut, verifikasi data menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa penerima benar-benar sesuai kriteria. Selain itu, dokumentasi data penerima merupakan langkah administrasi yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta memudahkan pelaporan baik kepada pemerintah maupun lembaga terkait.

Namun, dalam praktiknya proses verifikasi dan dokumentasi data penerima PKH tidak jarang menghadapi kendala. Faktor seperti keterlambatan data dari instansi terkait, ketidaksesuaian informasi, rendahnya literasi digital sebagian penerima, hingga keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran, kesalahan pencatatan, bahkan potensi terhambatnya penyaluran bantuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi proses verifikasi dan dokumentasi data yang jelas, akurat, dan efisien di BRI Unit Ampenan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bantuan PKH tersalurkan tepat waktu, sesuai regulasi, dan tepat sasaran. Dengan adanya sistem verifikasi dan dokumentasi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana bantuan, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan utama program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menyusun Laporan Magang dengan judul “Implementasi Proses Verifikasi dan Dokumentasi Data Penerima Program Keluarga Harapan Pada BRI Unit Ampenan” sebagai Laporan Tugas Akhir.

TINJAUAN LITERATUR

Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau keputusan yang telah disusun sebelumnya ke dalam tindakan nyata. Secara konseptual, implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan instruksi atau kebijakan, tetapi juga melibatkan pengaturan mekanisme operasional, koordinasi antaraktor, serta penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan program. Tahap ini menjadi bagian yang sangat krusial karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, strategi, maupun program ketika dijalankan di lapangan. Pelaksanaan implementasi memerlukan dukungan sumber daya, kompetensi pelaksana, prosedur kerja yang tepat, serta kondisi lingkungan organisasi dan sosial yang mendukung (Ningsi, 2025).

Implementasi merupakan serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Proses ini tidak hanya sebatas menjalankan instruksi, tetapi juga mencakup penyesuaian mekanisme kerja, koordinasi antarpelaksana, serta pengelolaan sumber daya agar pelaksanaan dapat berjalan efektif. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya pendukung, karakteristik serta kapasitas agen pelaksana, dan kondisi lingkungan eksternal seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik (Sabatier, 2023).

Menurut Kholifah (2023), tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, program, atau rencana yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara nyata sesuai dengan tujuan awalnya. Implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan kegiatan, tetapi upaya sistematis untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata dan hasil yang terukur. Dalam literatur administrasi publik, tujuan implementasi mencakup sebagai berikut:

- Implementasi bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, atau rencana yang telah dirumuskan benar-benar dapat diterapkan dan diwujudkan sesuai sasaran awal, bukan hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
- Implementasi juga diarahkan untuk menghasilkan output yang memenuhi standar dan target operasional sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- Implementasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat, koordinasi yang baik, struktur organisasi yang mendukung, dan prosedur kerja yang optimal.

Proses

Proses merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang saling berkaitan dan dilakukan secara terstruktur untuk mengubah input (masukan) menjadi output (keluaran) guna mencapai tujuan tertentu. Proses tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari suatu sistem yang terorganisir dan saling mendukung antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. proses adalah sekumpulan aktivitas yang menggunakan sumber daya tertentu untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pengguna (Jogiyanto, 2017)

Tujuan utama dari penerapan suatu proses menurut Mulyadi (2016) adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan output yang optimal, efektif, dan efisien. Proses juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan, konsistensi, dan kejelasan alur kerja dalam suatu organisasi. Manfaat dari adanya proses antara lain meningkatkan

efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan, memudahkan pengawasan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks sistem akuntansi dan organisasi, proses yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi kualifikasi tertentu (kronis, rentan terhadap guncangan ekonomi) dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perlindungan sosial yang berupaya memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya (Luthfi, n.d.)

Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Dalam jangka pendek dana bantuan program keluarga harapan bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi (Londah, 2018)

Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan akurat. Ini bisa dilakukan dengan cara mengecek dan mengonfirmasi keabsahan data tersebut dari sumber yang tepercaya, seperti sistem pencatatan sipil dari pemerintah atau sistem internal perusahaan. Verifikasi data sangat penting karena data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesimpulan yang salah atau keputusan yang tidak tepat. Di dalam dunia bisnis, verifikasi data merupakan bagian dari proses pengelolaan data yang baik (Ad Ins, 2025)

Dokumentasi Data

Istilah dokumentasi bermakna sama dengan istilah pengawasan bibliografi artinya pengawasan dan pencatatan terhadap luaran literer yang berasal dari berbagai negara. Kalau dalam Bahasa Inggris definisinya berbunyi “documentation is equivalent to bibliographic control of the complete literary output of different countries” atau dokumentasi ekuivalen dengan pengawasan bibliografis atas luaran literer lengkap dari berbagai negara. Dengan kata lain dokumentasi berusaha mencatat semua buku yang terbit di semua tempat dari segala abad (Yudisman, 2021:3).

Fungsi Dokumentasi dalam Perusahaan atau dalam Bisnis :

- a. Sebagai catatan perusahaan untuk menjaga perusahaan tersebut
- b. Sebagai alat untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan, dan melakukan pengawasan
- c. Sebagai alat bukti
- d. Sebagai referensi sejarah atau histori dari Perusahaan
- e. Sebagai sumber informasi untuk keuangan, HR, dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen Perusahaan
- f. Sebagai keperluan pendidikan bagi karyawan baru

- g. Untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas, terutama klien perusahaan dan para pemangku kepentingan (Admin, 2022)

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Penulis melakukan kegiatan magang pada kantor PT. Bank BRI Unit Ampenan yang bertempat di Jl. Yos Sudarso No.36, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penulis melakukan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025. Adapun aktivitas kerja dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jam kerja yang di mulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA. Kegiatan yang penulis lakukan selama magang pada PT. Bank BRI Unit Ampenan adalah sebagai berikut :

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di Bank BRI Unit Ampenan
2. Mempelajari cara penggunaan sistem BRI, yaitu New Delivery System (NDS)
3. Membantu Suvervisor dalam mencari informasi identitas nasabah berupa nomor telepon melalui sistem BRI (NDS Non-Finansial).
4. Membantu nasabah dalam melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai.
5. Membantu Teller dalam mencetak Aatr (Bukti Kas) serta menyusun dan mengurutkan data transaksi kas masuk maupun kas keluar agar tertata rapi dan memudahkan proses pemeriksaan (Audit).
6. Mencatat register transaksi kas masuk dan kas keluar diatas 5 juta.
7. Membantu Customer Service dalam mencari serta memilah berkas dan dokumen jaminan nasabah di BRIMEN.
8. Mempelajari proses pembukuan untuk nasabah yang melakukan pelunasan (Over Booking)
9. Membantu Customer Service dalam melakukan digitalisasi dokumen dengan cara men-scan berkas Surat Pengakuan Hutang (SPH) nasabah agar tersimpan rapi di sistem bank. Penulis melakukan proses Credit Note (CN) Retur yang berperan dalam mengurangi jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan kepada penjual.
10. Mempelajari cara melakukan penghapusan blokir pada rekening gaji pensiunan nasabah secara manual melalui sistem bank.
11. Mengikuti kegiatan roleplay bersama Teller, Satpam, dan berperan sebagai nasabah.
12. Mencatat register transaksi kas masuk dan kas keluar diatas 5 juta.
13. Melengkapi/mencatat nomor rekening penerima bantuan pip pada kertas AR guna memastikan kelengkapan identitas nasabah.
14. Membantu CS melengkapi data Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
15. Scan berkas taspen untuk pengajuan Uang Duka Wafat (UDW)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ampenan didirikan didirikan pada 1 Januari 1993. Produk-produk perbankan yang ditawarkan antara lain :

1. Simpedes

Simpedes merupakan simpanan yang termasuk dalam kelompok tabungan. Simpedes adalah simpanan masyarakat pedesaan di BRI, termasuk dalam kelompok tabungan yang pengambilan maupun penyetorannya tidak dibatasi dalam jumlah maupun frekuensi sepanjang saldo mencukupi. Simpedes mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada November 1984, dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat guna menunjang sumber dana Kupedes. Dengan adanya fasilitas online dan sebagian besar BRI Unit telah terhubung dengan jaringan online, masyarakat dapat menikmati transaksi online maupun melakukan transaksi melalui ATM. Ketentuan saldo mengendap sebesar Rp. 50.000, bila selama tiga bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan rekening tersebut kosong, rekening Simpedes akan tertutup secara otomatis.

2. Britama

Britama merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di Kanca dan BRI Unit yang sudah online, yang pengambilan maupun penyetorannya tidak dibatasi selama saldo masih mencukupi. Saldo mengendap sebesar Rp. 50.000 agar tabungan tetap aktif. Tidak ada transaksi selama tiga bulan berturut-turut dan tidak ada saldo mengendap, rekening Britama akan tertutup secara otomatis.

3. Deposito BRI (DepoBRI)

Deposito BRI adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan antara penyimpan dengan bank. Tanda bukti atas simpanan deposito di BRI Unit adalah Bilyet DepoBRI yang resmi diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama pemiliknya dan tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya sertifikat deposito maupun dipindahtangankan kepada orang lain tanpa surat kuasa pemiliknya.

4. Kupedes

Kupedes adalah Kredit Umum Pedesaan yang diberikan oleh BRI Unit kepada masyarakat yang bersifat individual, selektif dan berbunga wajar untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Kupedes yang diberikan kepada masyarakat ada beberapa jenis, antara lain Kupedes Komersil untuk pedagang atau usaha dan Kupedes Golbertap (Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap), yang termasuk dalam Golbertap menurut Surat Edaran Kanpus BRI S.112- DIR/BUD/8/89 yaitu:

- 1) Semua Pegawai Negeri Sipil
- 2) Pensiunan dari Gobeltrap
- 3) Pegawai tetap dari perusahaan swasta
- 4) Pegawai BUMN

5. KUR Mikro

Kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh pihak bank. Bank BRI menyediakan fasilitas penyaluran KUR yang hanya ditujukan untuk usaha yang termasuk golongan usaha mikro, kemudian program itu disebut KUR Mikro. Program KUR Mikro ini diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses Verifikasi Data Penerima PKH

1. KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Proses diawali dari pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM menyiapkan dokumen pribadi yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setelah dokumen tersebut lengkap, KPM menyerahkan seluruh dokumen kepada Pendamping PKH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

Selanjutnya, Pendamping PKH melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan data yang diserahkan oleh KPM. Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan keputusan terkait apakah data yang diberikan sudah lengkap dan valid. Apabila data dinyatakan belum lengkap atau tidak valid, maka data tersebut akan dikirimkan ke Pemerintah Desa/Dinas Sosial untuk dilakukan proses validasi dokumen kependudukan melalui sistem Dukcapil serta penyesuaian data yang diperlukan. Setelah proses tersebut selesai, data akan disinkronisasikan kembali agar sesuai dengan data kependudukan yang sah.

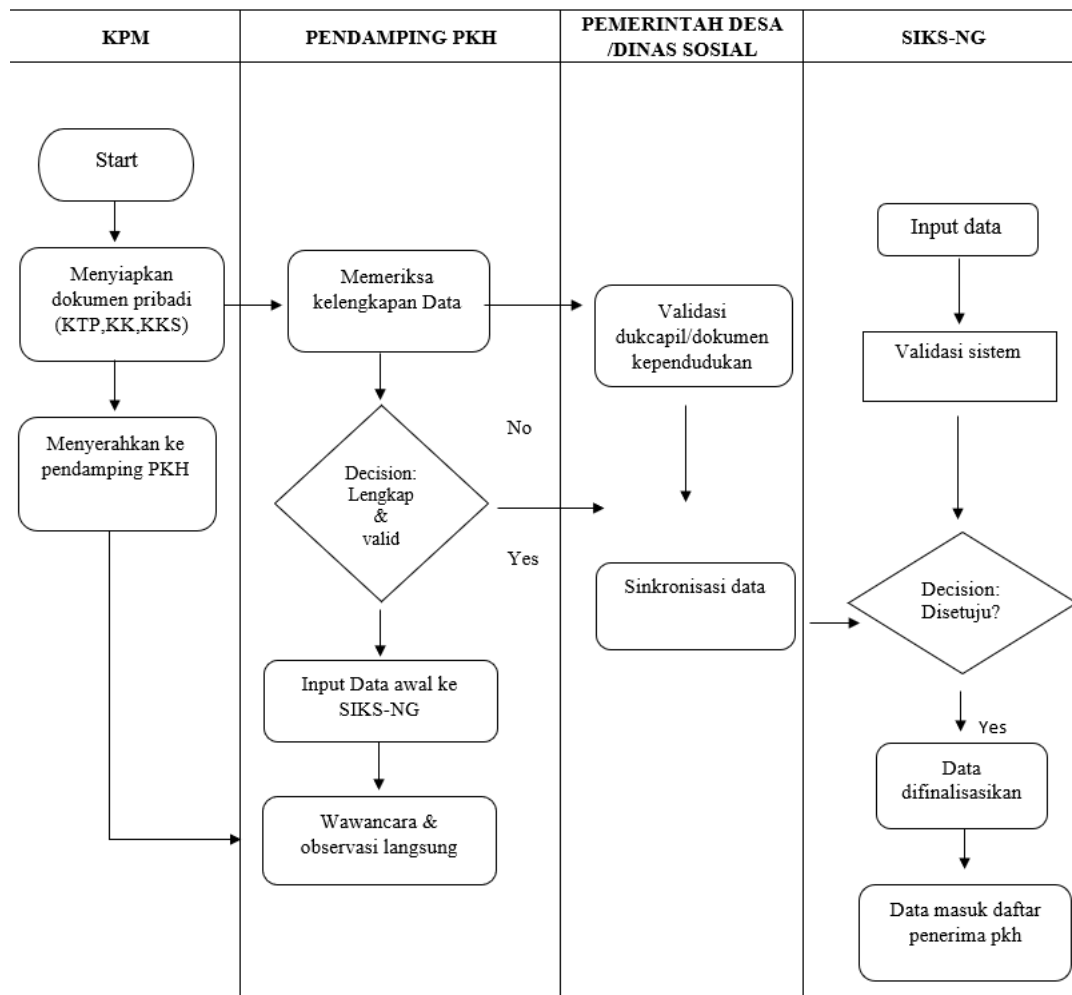
3. Pemerintah Desa/Dinas Sosial

Apabila data dinyatakan lengkap dan valid, maka Pendamping PKH melanjutkan proses dengan melakukan input data awal ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Selain itu, Pendamping PKH juga melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap KPM guna memastikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga sesuai dengan data yang telah diinput.

4. SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)

Tahap berikutnya berada pada SIKS-NG, di mana data yang telah diinput akan diproses dan divalidasi oleh sistem. Sistem kemudian melakukan pengambilan keputusan terkait persetujuan data penerima. Apabila data disetujui, maka data tersebut akan difinalisasi dan secara otomatis masuk ke dalam daftar resmi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, KPM yang bersangkutan dinyatakan layak dan tercatat sebagai penerima bantuan PKH.

Flowchart Implementasi Proses Verifikasi dan Dokumentasi Data Penerima Program Keluarga Harapan



Gambar 1 Bagan Alir (Flowchart) Implementasi Proses Verifikasi dan Dokumentasi Data Penerima Program Keluarga Harapan

Secara keseluruhan, alur proses ini menunjukkan bahwa verifikasi dan dokumentasi data penerima PKH dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi antara pihak KPM, Pendamping PKH, Pemerintah Desa/Dinas Sosial, serta sistem SIKS-NG. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan data, meningkatkan akurasi penerima bantuan, serta memastikan penyaluran PKH tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Verifikasi DTKS dalam PKH

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan Verifikasi DTKS PKH didukung oleh beberapa faktor utama yaitu :

- 1) Sumber daya manusia yaitu, perangkat desa, kepala dusun, RT/RW, operator SIKS-NG, dan pendamping PKH aktif terlibat dalam Musyawarah Desa untuk memastikan data akurat dan transparan.
- 2) Dasar hukum dan prosedur pelaksanaan verbal berpedoman pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021, serta SOP dan pelatihan dari Dinas Sosial yang meningkatkan pemahaman SDM.

- 3) Dukungan teknis dan koordinasi yaitu operator SIKS-NG mempercepat input data, sementara komunikasi antarperangkat desa berjalan lancar melalui koordinasi rutin dan grup WhatsApp.

2. Faktor Penghambat

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana mengurangi efektivitas verifikasi di lapangan, terutama ketika RT, RW, atau kepala dusun tidak sepenuhnya memahami kondisi warga, sehingga akurasi data berisiko menurun. Selain itu, integritas pelaksana dan warga juga menjadi tantangan, misalnya ada RT yang mengusulkan anggota keluarganya sendiri atau warga yang memberikan keterangan tidak sesuai untuk tetap menerima bantuan. Hambatan teknis turut mempengaruhi proses, termasuk kesulitan penggunaan aplikasi SIKS-NG seperti data yang tidak bisa dicopy-paste, tampilan awal yang tidak lengkap, serta gangguan jaringan internet yang memperlambat input dan sinkronisasi data. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan verifikasi DTKS tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi juga memerlukan sumber daya manusia yang memadai, integritas pelaksana, dan dukungan teknis yang stabil.

Dampak Program Keluarga Harapan

1. Dampak Positif

Program bantuan sosial, terutama PKH memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dengan memastikan bantuan tepat sasaran. Dampak tersebut terlihat dari kemampuan warga memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, serta akses kesehatan, termasuk bagi lansia dan keluarga dengan tanggungan ganda. Bantuan PKH juga mendorong penerima untuk mandiri melalui usaha kecil-kecilan. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi data dan proses verifikasi yang sistematis, sehingga manfaat bantuan sosial dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Dampak Negatif

Meskipun kebijakan verifikasi DTKS membawa manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan warga, pelaksanaannya juga menimbulkan dampak negatif. Beberapa warga menjadi tergantung pada bantuan sosial, kehilangan motivasi untuk bekerja atau memulai usaha, dan terus berharap memperoleh bantuan meski secara ekonomi mampu. Kondisi ini diperparah oleh pola pikir “jiwa miskin” di sebagian warga yang merasa selalu kekurangan. Dampak ketergantungan ini menjadi perhatian perangkat desa dan pendamping PKH, yang menekankan perlunya edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi agar bantuan berfungsi sebagai jaring pengaman sementara, bukan sebagai sumber penghidupan utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian kegiatan verifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi dan pendataan penerima PKH telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping PKH, Pemerintah Desa/Dinas Sosial, serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang masing-masing memiliki peran dan

tanggung jawab dalam menjamin keakuratan data penerima bantuan. Pelaksanaan verifikasi diawali dengan pengumpulan dan penyerahan dokumen administrasi oleh KPM, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan data oleh Pendamping PKH. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dilakukan validasi melalui Pemerintah Desa/Dinas Sosial dengan mengacu pada data kependudukan Dukcapil, serta proses sinkronisasi data. Data yang telah dinyatakan lengkap dan valid selanjutnya diinput ke dalam sistem SIKS-NG dan melalui tahapan validasi sistem sebelum ditetapkan sebagai penerima PKH.

Secara keseluruhan, proses verifikasi dan dokumentasi data penerima PKH yang diterapkan telah mendukung ketepatan sasaran program bantuan, meningkatkan akurasi data penerima, serta menunjang efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan tujuan kebijakan sosial pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dalam proses pencairan bantuan, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lupa membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan, disarankan agar Pendamping PKH bersama pihak terkait dapat meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada KPM mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pemberian informasi yang jelas dan berulang sebelum jadwal pencairan, seperti daftar dokumen yang wajib dibawa, diharapkan dapat mengurangi kendala administrasi. Selain itu, penggunaan media pengingat sederhana, baik secara lisan maupun tertulis, dapat membantu KPM mempersiapkan dokumen dengan lebih baik sehingga proses pencairan bantuan dapat berjalan lebih tertib, lancar, dan efisien.

REFERENSI

- Ad Ins. (2025, March 15). Verifikasi Data Pelanggan: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya. <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>
- Admin. (2022, July 29). Dokumentasi Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>
- Aldar, A. (2023). Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandar Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 228-251.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323, 35-36.
- Isnaini Kholif, K., & Noor, I. (n.d.). Implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto. In *JAP* (Vol. 2, Issue 4).
- Jogiyanto, H. M. (2017). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Kajian Ilmu Kependidikan* 4(2):101–12. doi: 10.46773/muaddib.v4i2.362
- Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kholifah, E. P. 2023. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Al-Muaddib: Jurnal*
- Kushardiyanti, K. A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (pkh) di desa pancakarya kecamatan ajung kabupaten jember: implementasi program keluarga harapan (pkh) di desa pancakarya kecamatan ajung kabupaten jember. *Jurnal Ekuilibrium*, 4(1), 1-16.
- Londah, A. A., Tampi, G. B., & Londa, Y. (n.d.). Implementasi program keluarga harapan di kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara.
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81-89.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nilamsari, Natalina. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13(2):177–81.

- Ningsi, R. 2025. "Implementasi Sebagai Proses Penerapan Kebijakan: Konsep Dan Pendekatan." *Jurnal Administrasi Negara (JANE)* 17(1):114–23. doi: 10.24198/jane.v17i1.64765.
- Sabatier, Mazmanian &. 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Sistem Administrasi Publik." *Jurnal Studi Ekonomi*. Ari Purwanti, W. S. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Kota Solok, Sumatera Barat: pt mafy media literasi indonesia.
- Nugrohadhi, Agung. 2015. "Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan." *hizannah Al Hikmah* 3 (1): 1–10.
- Purwono, S. (2022). *Konsep dan Definisi Dokumentasi*. Pustaka. Ut. Ac. Id, 1.
- Senkus, P., Glabiszewski, W., & Wysokińska-Senkus, A. (2021). Process Definitions – Critical Literature Review. *European Research Studies Journal*, 24(3), 241–255.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (n.d.). Pelaksanaan program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). In *JAP* (Vol. 2, Issue 1).
- Yudisman, Septevan Nanda. 2021. "Analisis Perbandingan Tokoh Perpustakaan Paul Otlet dan Sulisty-Basuki Tentang Dokumentasi." *Libria* 13 (2): 1–14.
- Zetira, N. Z., Karwati, L., & Novitasari, N. (2023). Penyaluran Program Keluarga Harapan Melalui Pemberian Bantuan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Kuningan. *JoCE (Journal of Community Education)*, 3(2), 79-85.